



Daftar Isi

Kata Sambutan—iii

Kata Pengantar—xix

Daftar Isi—xxiii

BAB 1: PENDAHULUAN —1

Deskripsi Singkat—5

Isi Buku Ekonomi Publik—7

Pentingnya Wawasan Ekonomi Publik dalam Menyejahterakan Masyarakat—9

Instruksional (Khusus, Umum)—11

BAB 2: KONSEP EKONOMI PUBLIK —13

Pengertian Ekonomi Publik—14

Lingkup Ekonomi Publik—16

Konsep Ekonomi—16

Ekonomi sebagai Ilmu—19

Model dalam ekonomi —21

Fungsi dalam Ekonomi —24

Negara, Pemerintah, dan Ekonomi Publik—27

Arus dan Perputaran kegiatan Ekonomi Publik—31

Permintaan (*Demand*), Penawaran (*Supply*), dan Mekanisme Pasar—32

Permintaan —32

Penawaran —35

Mekanisme Pasar —36

Proses Kegiatan Ekonomi Publik —37
Investasi dan Kesejahteraan Masyarakat—41
Konsep dan Pengertian Investasi —41
Jenis Investasi Menurut Dorongan dan Proses yang Menimbulkan Investasi —42
Aspek Investasi —45
Manfaat Investasi—47
Investasi menurut Penyelenggara dan Tujuannya—49
Risiko Investasi—52
Jenis dan Sifat Risiko—53
Risiko Investasi Swasta (<i>Private Investment Risk</i>)—54
Risiko Investasi Publik (<i>Public Investment Risk</i>)—54
Manajemen Risiko Investasi—55
Barang dan Jasa Kebutuhan Publik—56
Jenis Barang dan Jasa —58
Kesimpulan—62
Diskusi—64

BAB3: AKTOR, KINERJA EKONOMI PUBLIK, DAN KEBIJAKAN EKONOMI NEGARA —67

Aktor dan Pelaku Ekonomi Publik—68
Penyelenggara Negara —69
Kelompok Dunia Usaha —70
Kelompok Masyarakat Madani —70
Perilaku Aktor Ekonomi Publik —72
Perilaku Penyelenggara Negara —73
Perilaku Dunia Usaha —73
Perilaku Masyarakat —73
Indikator Kinerja Ekonomi Publik —74
Pendapatan—74
Makin Banyaknya Pilihan Konsumsi Barang dan Jasa—79
Meningkatnya Aktivitas Ekonomi di Masyarakat—80
Meningkatnya Investasi Di Masyarakat, Terutama oleh Masyarakat Lokal (Nasional), dan Investasi Asing Hanya sebagai Pelengkap—81
Membaiknya Iklim Usaha—81
Makin Berdayanya Negara secara Ekonomi, Politik, Maupun Sosial —84
Konsistensi Indikator Mikro dan Makro Ekonomi —84
Pemerintah dan Ekonomi Publik —87
Pemerintah Sebagai Konsumen —87
Pemerintah Sebagai Investor —87

Pemerintah Melakukan Pembayaran kepada Masyarakat —87
Pemerintah Pembuat Kebijakan Ekonomi Publik untuk Memperjuangkan Kepentingan Nasional —88
Pemerintah dan Kesejahteraan Publik —90
Peran Pengarah—91
Peran Pengatur—92
Peran Pengawas—94
Skala Prioritas Kebijakan Ekonomi Negara —96
Pertimbangan Parameter Prioritas —96
Kebijakan Negara dalam BUMN dan BUMD untuk Kesejahteraan Rakyat—103
Perlunya Kebijakan Ekonomi Negara memperbaiki kinerja Ekonomi Publik—103
Kebijakan Ekonomi Negara untuk Kesejahteraan Publik—103
Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Publik (<i>Public Management</i>)—104
Kebijakan Ketahanan dan Kedaulatan Ekonomi Nasional —104
Kebijakan Ekonomi Negara dalam Mendorong Pertumbuhan Bisnis—109
Perencanaan Investasi Makro (oleh Pemerintah)—117
Kesimpulan—121
Diskusi —124

BAB 4: PASAR, KESEJAHTERAAN PUBLIK, DAN OPTIMALITAS PARETO—127

Konsep dan Pengertian Pasar—128
Parameter Yang Menentukan Bentuk atau Struktur Pasar—129
Apa yang dilakukan oleh Pasar—131
Bentuk (Struktur) Pasar Produsen dan Konsumen—131
Pasar Persaingan Bebas (<i>Free Market Competition</i>)—131
Pasar Persaingan Monopolistik —135
Pasar Oligopoli —138
Pasar Monopoli (<i>Monopoly Market</i>)—143
Perusahaan dan Pasar —146
Perilaku Perusahaan Masuk ke Pasar —146
Perilaku Perusahaan Bersaing di Pasar —147
Individu (Produsen & Konsumen) Pasar dan Pemerintah—147
Prinsip Pareto—148
Konsep Optimalitas Pareto —148
Konsep Dasar Sistem Pareto—166
Keterbatasan Kriteria Pareto—168
Kriteria Potensi Pareto—168
Kesimpulan Mengenai Prinsip Pareto Optimal—170

Kesimpulan—170

Diskusi—172

BAB 5: EKSTERNALITAS—177

Konsep dan Pengertian Eksternalitas—178

Eksternalitas dan Masyarakat—179

Manfaat Bagi Masyarakat (*Benefit to Society*)—179

Beban atau Biaya Bagi Masyarakat (*Cost on Society*)—180

Jenis-Jenis Eksternalitas—181

Eksternalitas Positif atau Dampak Positif (+)—181

Eksternalitas Negatif atau Dampak Negatif (—)—184

Pengukuran Eksternalitas—187

Surplus Konsumen—187

Surplus Produsen—188

Kesediaan untuk Membayar—189

Analisis Biaya dan Manfaat—189

Pasar dan Eksternalitas—193

Pasar dengan Eksternalitas Negatif—193

Penyelesaian Masalah Eksternalitas—195

Penyelesaian oleh Privat—195

Penyelesaian oleh Negara—197

Kesimpulan—205

Diskusi—205

BAB 6: KEBIJAKAN LELANG TERBUKA (*COMPETITIVE BID*)—209

Pengertian Tender atau Lelang Terbuka (*Competitive Bid*)—209

Sistem Penawaran Harga dalam Lelang atau Tender (*Type of Price Quotes*)—210

Penawaran dengan Sistem Harga yang Sudah Tetap (*Fixed-Price Bid*)—210

Penawaran dengan Sistem *Fee* (*Cost-Plus-Fee Bid*)—211

Penawaran dengan Berbagi Risiko (*Risk Sharing Bid*)—211

Kelebihan dan Keterbatasan Sistem Penawaran Harga yang Digunakan dalam Tender
Dilihat dari Kepentingan Ekonomi Nasional Jangka Panjang—211

Kelebihan dan Keterbatasan Sistem Penawaran Harga *Fixed-Price Bid*—211

Kelebihan dan Keterbatasan Sistem Penawaran Harga *Cost-Plus-Fee Bid*—212

Kelebihan dan Keterbatasan Sistem Penawaran Harga *Risk Sharing Bid* atau *Incentive Bid*—212

Prinsip Tender yang Kompetitif—213

Manfaat Tender yang Kompetitif dan Terbuka—213

Manfaat Secara Mikro—213

Manfaat Secara Makro (Nasional)—213
Unsur yang Ditenderkan —214
Sistem Penawaran Harga Apa yang Dipakai?—214
Bagaimana Peserta Memenangkan Tender?—215
Menyusun Harga Penawaran Berdasarkan Nilai Sekarang dari Peningkatan Pendapatan Netto (<i>Expected Present Value Contribution/EPVC</i>)—216
Menyusun harga penawaran berdasarkan tambahan biaya pekerjaan (<i>mark-up price</i>)—217
Sikap Perusahaan Peserta Tender Menghadapi Tender Terbuka—220
Kesimpulan—220
Diskusi—221

BAB 7: PASAR, NEGARA, DAN KRISIS EKONOMI (MARKET, STATE, AND ECONOMIC CRISIS)—227

Pasar yang Bersaing dan Pasar yang Gagal—228
Pasar yang Bersaing —228
Pasar yang Bersaing dan Pasar yang Efisien—230
Pasar yang Gagal—231
Pemerintah dan Kepentingan Ekonomi Nasional—232
Kepentingan Ekonomi Nasional—233
Intervensi Pemerintah pada Ekonomi Nasional—234
Negara Wajib Melindungi Kepentingan Usaha Nasional dalam Perdagangan Internasional—234
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara—251
Pengertian dan Konsep APBN—252
Kebijakan APBN yang Lazim dalam Praktek—253
Penerimaan Negara (Pemerintah)—255
Sumber Utama Pendapatan Negara—255
Sumber Pendapatan Negara Lainnya—257
Pengeluaran negara—258
Konsumsi Pemerintah—258
Investasi Negara yang Dilaksanakan Pemerintah —259
(<i>Government Investment</i>)—259
Pembayaran oleh Negara kepada Masyarakat—259
Pembiayaan APBN dengan Utang—260
Siklus APBN—260
Profil dan Kinerja APBN 2000-2009—260
Pendapatan Negara dan Hibah—260
Kinerja Penerimaan atau Pendapatan Negara—262
Kinerja Kesejahteraan Masyarakat Dilihat dari Tingkat Inflasi—265

